

KEGIATAN DPR-RI AWAL OKTOBER 2011

Kegiatan minggu ini diawali dengan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Komisi, Pansus dan Badan-Badan.

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie

Pada hari Senin, 3 Oktober 2011, dilakukan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi III yang dihadiri oleh Pimpinan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. Dalam Rapat Konsultasi ini tidak dihadirkan Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI, karena sedang membahas RAPBN 2012 dan melakukan konsinyering kegiatan di Wisma DPR di Kopo, Jawa Barat. Rapat Konsultasi ini merupakan pertemuan konsultasi lanjutan minggu sebelumnya yang tidak dapat dihadiri oleh Pimpinan KPK. Pada Rapat Konsultasi yang bersifat terbuka ini, dibuka dialog antara Pimpinan Komisi III dan Pimpinan KPK, sehubungan dengan adanya pemanggilan secara bersamaan Pimpinan Badan Anggaran oleh KPK dalam kapasitas sebagai saksi kasus Menakertrans dan berbagai sorotan lain yang berkaitan dengan kinerja KPK. Setelah berlangsung sekitar 1,5 jam, Rapat konsultasi ditutup tanpa adanya kesimpulan.

Pada hari Selasa, 4 Oktober 2011, Dewan melakukan Rapat Paripurna terbuka dengan 3 agenda: [1] Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (Hapsem) BPK-RI tahun anggaran 2011; [2] Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Bantuan Hukum untuk mendapat persetujuan dewan; [3] Penetapan calon-calon anggota Hakim Agung hasil pemilihan calon yang telah dilakukan oleh Komisi III. Pada agenda pertama, penyerahan Hapsem Semester I tahun 2011, BPK melaporkan, telah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, BUMD, serta lembaga/badan lainnya.



Prioritas pemeriksaan dilakukan pada LKPP Tahun 2010, pemeriksaan LKPD Tahun 2010 dan Laporan Keuangan Badan lainnya, termasuk BUMN. Pemeriksaan kinerja dan PDDT juga dilakukan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK pada Semester I tahun 2011 sebanyak 682 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan sebanyak 460 objek, pemeriksaan kinerja sebanyak 14 objek, dan PDDT sebanyak 208 objek. Hasil pemeriksaan (IHPS I Tahun 2011) menemukan, sebanyak 11.430 kasus senilai Rp 26,68 triliun. Dari total temuan pemeriksaan BPK tersebut, sebanyak 3.463 kasus senilai Rp7,71 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Adapun temuan pemeriksaan

berupa temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 7.967 kasus senilai Rp18,96 triliun. BPK juga banyak menemukan berbagai kelemahan administrasi dan SPI. Dari temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp7,71 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp 136,77 miliar (1,77%).

BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 1 (satu) LKPP Tahun 2010, dan telah diberikan opini WDP. Untuk 83 LKKL Tahun 2010, BPK telah memberikan opini sebagai berikut: [1] WTP atas 52 LKKL; [2] WDP atas 29 LKKL; [3] TMP pada 2 LKKL. Sedangkan untuk 363 LKPD, yang meliputi 358 LKPD Tahun 2010 dan 5 LKPD Tahun 2009, BPK memberikan opini sbb: [1] WTP atas 32 LKPD; [2] WDP atas 271 LKPD; [3]

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **PENANGGUNG-JAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

TW atas 12 LKPD; [4] TMP atas 43 LKPD; [5] TMP untuk 5 LKPD Tahun 2009.

Agenda kedua adalah merupakan pelaksanaan fungsi legislasi. Dalam rapat paripurna ini, Pemerintah diwakili Menkumham menyampaikan pokok-pokok tanggapan pemerintah sebagai berikut: gagasan awal yang melatarbelakangi pemikiran UU tentang Bantuan Hukum tidak terlepas dari upaya perwujudan kebijakan politik hukum nasional yang mengacu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara seharusnya menjamin terciptanya peluang memperoleh keadilan terutama

bagi orang miskin yang berhadapan dengan masalah hukum. Fakta dan kenyataan bahwa penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin dan terutama di pedesaan dan berbagai kota di Indonesia, masih memprihatinkan dan membawa citra kurang baik. Penyelenggaraan pemberian bantuan kepada warganegara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang me-ngakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warganegara akan kebutuhan akses hukum dan kesamaan dihadapan hukum. Oleh karena itu, dengan dibentuknya UU tentang Bantuan Hukum ini, akan menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Dengan berlakunya UU ini, diharapkan terbentuk suatu mekanisme pengelolaan bantuan hukum yang disediakan pemerintah berdasarkan alokasi APBN. Kemenkumham berdasar UU ini dibebani tugas dan fungsi yang harus menjamin tersedianya bantuan hukum secara merata di seluruh Indonesia bagi orang miskin pencari keadilan yang didukung oleh sistem yang akuntabel dan transparan.

Agenda ketiga, adalah penetapan Calon Hakim Agung melalui persetujuan Sidang Paripurna DPR. Calon-calon ini telah dilakukan Fit and Proper Test dan pemilihan secara voting oleh Komisi III. Enam (6) calon (dari 18 calon) telah diputuskan untuk mengisi kekosongan keanggotaan Hakim Agung RI, dengan urutan sebagai berikut: Suhadi, SH, MH., Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH., Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH., Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH, MH., Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, SH, MH., Dr. HM. Hary Jatmiko SH, MH. Calon yang telah mendapat persetujuan rapat paripurna akan diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hari Rabu, 5 Oktober 2011, Tim Pengawas Cen-



Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi III yang dihadiri oleh Pimpinan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung.

tury telah melakukan rapat kerja dipimpin Wakil Ketua Ir. H. Pramono Anung Wibowo MM, dihadiri oleh Jaksa Agung dengan agenda melanjutkan pembahasan cross examination data antara Jaksa Agung dengan Tim Pengawas Century terkait kasus Bank Century. Kesimpulan dari rapat ini adalah [1] Tim Pengawas Century mendorong kejaksanaan Agung untuk segera menyelesaikan penanganan kasus Bank Century yang menjadi bidang tugasnya, mempercepat proses pengembalian aset yang ada di Swiss melalui gugatan perdata dan bekerjasama dengan Tim Pengacara yang ditunjuk untuk secara serius menangani gugatan Hesham Al Warraq di Pengadilan Arbitrase OKI dan Ravat Ali Rizvi di pengadilan Arbitrase ICISD. [2] Tim Pengawas Century mendorong kejaksanaan untuk mempercepat proses penyelesaian ganti rugi nasabah Antaboga Delta Sekuritas.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Komisi II telah melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah pada tanggal 3 Oktober, yaitu dengan menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Kepala BPKP, dan Kepala BKN. Kesimpulan rapat antara lain: [1] dalam rangka penataan kepegawaian secara nasional, Komisi II DPR dapat memahami kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium PNS mulai 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012. [2] agar kebijakan moratorium PNS ini berlaku efektif dan tepat sasaran, DPR meminta Kementerian PAN dan RB untuk: (a) menyelaraskan jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi PNS secara nasional, baik dalam satuan unit organisasi maupun antar instansi, baik antara Pusat dan Daerah maupun antar daerah, termasuk antara jabatan srutuktural, jabatan fungsional umum maupun tertentu, (b) kementerian PAN dan RB bersama BKN agar melakukan supervisi dan memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan analisis jabatan, menghitung kebutuhan jumlah pegawai secara riil dan me-

nyempurnakan sistem rekrutmen CPNS termasuk lulusan pendidikan kedinasan, sehingga tahun 2012 proyeksi kebutuhan PNS untuk 5 tahun kedepan bisa diketahui secara proporsional dan dilaporkan ke Komisi II paling lambat Juni 2012, (c) pemerintah menerapkan prinsip “penghargaan dan sanksi” dalam upaya menetapkan kebijakan tentang belanja pegawai PNS agar menjadi lebih proporsional di kementerian/lembaga dan pemda. [3] Komisi II dan Menteri PAN dan RB bersepakat bahwa kebijakan moratorium PNS ini bersifat selektif. Kementerian PAN dan RB agar segera melakukan kajian dan evaluasi serta menetapkan kebutuhan PNS di sektor tertentu dan daerah tertentu yang termasuk dalam pengecualian dari kebijakan moratorium ini.

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Bank Indonesia pada tanggal 8 September 2011 yang lalu, telah disepakati untuk membentuk 3 (tiga) panja yaitu Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; (2) Panja Belanja Pemerintah Pusat, dan (3) Panja Transfer ke Daerah. Pembentukan panja ini bertujuan agar pembahasan RUU APBN TA 2012 lebih efektif dan efisien.

Saat ini Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan sedang melakukan pembahasan mulai tanggal 30 September s.d 5 Oktober 2011. Materi pembahasan yang dalam panja ini meliputi asumsi dasar, penerimaan perpajakan, penerimaan perpajakan migas, PNBPN baik SDA (Kehutanan, Perikanan, Pertambangan Umum, Panas Bumi) maupun non-SDA (PNBP Lainnya yang meliputi Kementerian/Lembaga), Laba BUMN, subsidi energi (BBM dan Listrik), besaran defisit dan pembiayaannya yang bersumber dari utang dan non utang, serta postur RAPBN 2012 secara keseluruhan.

Sesuai dengan Pasal 66, Tatib DPR RI dinyatakan bahwa Badan Anggaran bersama pemerintah menetapkan asumsi makro dengan mengacu pada keputusan komisi yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Untuk itu, Komisi XI telah menyampaikan Kesepakatan Rapat Kerja antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Bank Indonesia tentang asumsi dasar RUU APBN 2012 sebagai acuan Badan Anggaran dalam melakukan pembahasan RUU tersebut. Asumsi dasar yang disampaikan adalah: [1] Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7% atau sama dengan usulan pemerintah, [2] Inflasi sebesar 5,3% atau sama dengan usulan pemerintah; [3] Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika sebesar Rp8.800/1USD atau sama dengan usulan pemerintah, [4] Suku Bunga SPN 3 Bulan sebesar 6,4% lebih rendah dari usulan pemerintah sebesar 6,5%.

Sedangkan Komisi VII juga menyampaikan hasil rapat kerjanya dengan Menko Bid. Perekonomian (selaku Men-

teri ESDM) kepada Badan Anggaran, yang menyimpulkan bahwa: [1] Harga minyak mentah dunia (ICP) sebesar US\$90/barel atau sama dengan usulan Pemerintah, [2] Lifting minyak mentah sebesar 950 ribu barel/hari atau sama dengan usulan pemerintah.

HASIL SIDANG APA DI SOLO

Sidang *Asian Parliamentary Assembly* (APA) tentang Tenaga Kerja Migran dan Konferensi Internasional tentang Persahabatan dan Kerjasama di Asia, di Solo, Jawa Tengah, 28-29 Oktober 2011, dihadiri 17 delegasi parlemen anggota APA dan 2 negara tamu. *Ad Hoc Committee Meeting on Migrant Workers* menghasilkan *Draft Resolution on The Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers in Asia*. Draft resolusi ini mencerminkan pentingnya peran parlemen, sekaligus dorongan bagi parlemen untuk mereview legislasi, terkait pekerja migran dan mendukung proses *budgeting* untuk program-program terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan yang utuh dan komprehensif bagi pekerja migran. Sesuai mekanisme APA, draft resolusi ini nantinya akan diajukan ke dalam Sidang Pleno APA di Suriah tahun ini untuk mendapat persetujuan seluruh anggota APA.

Delegasi Indonesia telah memperjuangkan kepentingan tenaga kerja Indonesia dalam draft resolusi, dengan memasukkan isu-isu penting bagi perlindungan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia kedalam draft resolusi tersebut. Seperti, perlunya komitmen seimbang dan bertanggung jawab antara negara pengirim dan penerima pekerja migran, hingga seruan untuk meningkatkan kualitas pekerja migran dari negara pengirim, demi meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran HAM para pekerja migran di negara penerima.

Dalam Konferensi Internasional mengenai prinsip-prinsip persahabatan dan kerjasama di Asia, para delegasi telah menyepakati Deklarasi Solo. Beberapa pesan yang terkandung dalam deklarasi adalah: [1] pentingnya upaya mempromosikan dan memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antara negara-negara di Asia dengan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kemerdekaan, integritas dan kedaulatan wilayah dan juga prinsip-prinsip *non-interference* urusan domestik negara lain sejalan dengan piagam PBB, piagam APA dan prinsip hukum internasional. [2] perdamaian dan keamanan abadi di kawasan Asia merupakan bagian dari tujuan utama persahabatan dan kerjasama di Asia. Dengan demikian, parlemen di Asia diharapkan dapat mendorong penggunaan penyelesaian konflik secara damai, dengan memajukan dialog. Sekaligus menegaskan pentingnya parlemen di Asia untuk melindungi HAM termasuk aspirasi atas demokrasi hingga perlunya perlindungan hak para pekerja migran. [3] parlemen memegang peran penting dalam mendukung prinsip tersebut dengan mengkonsolidasikan semangat yang ada, sekaligus memperkuat solidaritas berdasarkan aspirasi rakyatnya.

Panja Lingkungan Hidup Kawasan Danau Tinjau 15 Danau Prioritas di Indonesia

Panja Lingkungan Hidup Komisi VII DPR akan memprioritaskan kunjungan pada 15 danau prioritas di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Komisi VII DPR melakukan kunlap ke Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kaltim, diantaranya melihat langsung kondisi Danau Semayang, Melintang dan Jempang.

“Kondisi ekosistem perairan danau kita saat ini cenderung mengalami degradasi karena masih belum maksimalnya upaya pengelolaan ekosistem danau serta masih kuatnya ego sektoral yang kesemuanya itu berimplikasi pada koordinasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata ketua tim rombongan Sutan Sukarnotomo (F-PD), saat Kunlap ke Kaltim baru-baru ini.

Akibatnya, lanjut Sutan, fungsi dari danau sebagai supply air bersih bagi masyarakat disamping fungsi-fungsi lainnya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

Ia menambahkan, keberadaan danau sebagai sumber daya air telah banyak mengalami kerusakan akibat pencemaran, perubahan fungsi tata guna lahan atau dikarenakan pengelolaan yang kurang tepat. “Padahal, terkait upaya penyelamatan danau kita telah memiliki UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air,” tegasnya.

Menurutnya, konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air sangat diperlukan sebagai upaya yang menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas air untuk memenuhi keperluan seluruh makhluk hidup secara berkesinambungan, serta upaya pengendalian bencana alam, bencana sosial, bahkan bencana ekonomi yang mungkin terjadi akibat sumber daya air.

“Mudah-mudahan dengan melihat langsung danau tersebut dan adanya informasi yang komprehensif terhadap berbagai permasalahan akan menjadi dasar bagi Komisi VII dalam merumuskan rekomendasi kepada pemerintah terkait upaya pengelolaan ekosistem kawasan danau di Indonesia sesuai kewenangan yang dimiliki,” harapnya.



Panja Lingkungan Hidup Komisi VII DPR meninjau Danau Semayang, Melintang dan Jempang di Provinsi Kaltim

Sementara dari Badan DPR Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Kristayana mengatakan, kalau ditinjau dari aspek hidrologi, danau-danau tersebut berfungsi sebagai pengendali dan peredam banjir yang berasal dari hulu sungai Mahakam. Keberadaan danau tersebut merupakan pengatur aliran air sehingga luapan air banjir yang berasal dari hulu sungai Mahakam tidak langsung membanjiri kota-kota di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam bagian hilir.

Selain itu juga merupakan tempat kehidupan satwa air langka, yaitu Pesut Mahakam yang merupakan satu-satunya di dunia dan hidup di danau-danau sekitar sungai Mahakam. “Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi pengelolaan lingkungan perairan danau di daerah Mahakam Tengah,” jelasinya.

Dia menambahkan, manfaat kawasan sungai Mahakam merupakan jalur utama transportasi air dan be-

berapa danau dan rawa pada Daerah Mahakam Tengah (DMT) merupakan kawasan penting untuk perkembangan ikan dan berbagai jenis burung bangau-bangau, sebagai daerah tangkapan air, sebagai tempat pemukiman penduduk di bagian hilir. “Danau-danau tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar danau untuk lahan pertanian secara tradisional apabila danau-danau ini pada musim kemarau mengalami penurunan drastis dan beberapa tempat mengalami kekeringan,” tuturnya.

Tim Kunlap Komisi VII ke Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 7 orang anggota, rombongan tim dipimpin Sutan Sukarnotomo (F-PD) dan sejumlah anggota lintas fraksi, Albert Yaputra (F-PD), Heriyanto (F-PD), Sutan Bhatogana (F-PD), Azwir Dainy Tara (F-PG), Nazaruddin Kiemas (F-PDIP), dan Muhammad Idris Luthfi (F- PKS). (iw)/foto: iw/parle.

**

Komisi III Bentuk Panja RUU Sistem Peradilan Anak

DPR bertekad dapat menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Anak (SPA) pada akhir masa persidangan ini. Untuk mengefektifkan pembahasan Komisi III sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja).



Penjara khusus anak-anak



“ Dengan membentuk Panja kita harap pekerjaan lebih efektif, kalau perlu pembahasan sampai pukul 12 malam kita selesaikan, asal pemerintah kuat-kuat saja,” kata Ketua Komisi III Benny K. Harman saat memimpin rapat kerja dengan Menkumham Patrialis Akbar dan Menteri PPPA Linda Agum Gumelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/11).

Politisi Partai Demokrat ini optimis sebelum memasuki masa reses 28 Oktober nanti, RUU SPA yang merupakan revisi dari Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat diselesaikan. “Sejauh ini tidak ada permasalahan krusial dari pemandangan umum fraksi terkait pasal-pasal yang akan dibahas,” lanjutnya.

Panja RUU SPA beranggotakan 30 orang terdiri dari 26 anggota mewakili seluruh fraksi ditambah 4 orang jajaran pimpinan. Sedangkan Ketua Panja ditetapkan Azis Syamsudin politisi dari Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III.

Pada bagian lain Benny K. Harman mengingatkan kehadiran RUU SPA ini jangan sampai menghadirkan kontradiksi. “Perlu dijelaskan pada publik niat kita ingin melindungi anak kok dijawab dengan RUU Sistem Peradilan Anak karena mungkin terkesan ada kontradiksi. Karena lembaga peradilan nanti ada kriminalisasi bisa jadi nanti dianggap tidak melindungi,” imbuhnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat sempat mengingatkan pimpinan sidang tentang keseriusan anggota Panja untuk mengikuti persidangan. “Kehadiran anggota perlu jadi perhatian Ketua, ini bisa kita lihat dari kondisi rapat kerja kali ini,” ujarnya.

Menjawab hal ini Benny berjanji akan mengambil sikap. “Kalau anggota dewan tidak datang, kita laporkan saja kepada fraksinya,” tandasnya. (iky)foto:iky

Komisi I DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU Intelijen Negara

Dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfud Siddiq, dengan Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar dan Kepala Badan Intelijen Negera Sutanto, Kamis (29/9), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara pada awalnya merupakan RUU usulan Komisi I DPR-RI. Selanjutnya dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Desember 2010 diterima menjadi Rancangan Undang-Undang

Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara, dan selanjutnya akan segera dibahas dalam tingkat II ataupun pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna DPR RI.

luruhan berjumlah 247 DIM dengan karakteristik dan perincian DIM, yaitu 58 DIM bersifat tetap, 39 DIM bersifat redaksional, 30 DIM bersifat substansi, 50 DIM bersifat substansi baru, dan 70 DIM bersifat dipertimbangkan dihapus.

ter Penyadapan, Kluster Pemeriksaan Intensif, Kluster Kelembagaan, Kluster Kode Etik, Kluster Ancaman, Kluster Pengawasan, dan Kluster Masa Retensi.

Setelah melalui pembahasan antara Komisi I DPR RI dengan Pemerintah,



Tanda tangan kesepakatan antara Komisi I DPR dengan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara, Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq (kiri), dengan Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar (tengah) dan Kepala Badan Intelijen Negera Sutanto (kanan)

Usul Inisiatif DPR-RI yang terdiri dari 10 BAB dan 46 Pasal.

Selanjutnya Pemerintah mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Intelijen Negara sebagai bahan sandingan. Adapun DIM RUU tentang Intelijen Negara secara kese-

Terkait dengan perincian DIM, dalam rapat kerja antara DPR-RI dan Pemerintah telah menyepakati bahwa DIM substansi, substansi baru dan dipertimbangkan dihapus disetujui pembahasannya dibagi ke dalam beberapa kluster yang terdiri atas Klus-

sepakat definisi Intelijen Negara Pasal 1 angka 2 "Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara". (as) foto:as

Komisi X Minta Menpora Tunda SEA Games Palembang

Komisi X DPR RI minta Menpora untuk menunda pelaksanaan SEA Games Palembang. "Menunda berarti menyelamatkan muka Indonesia sebagai penyelenggara," demikian Utut Adianto Wakil Ketua Komisi X usai Rapat Kerja Komisi X dengan Menpora Andi Alfian Malarangeng Persiapan Sea Games XXVI/2011 di Gedung DPR Jakarta, Rabu (5/10).



Suasana Rapat Kerja Komisi X dengan Menpora Andi Alfian Malarangeng bahas persiapan Sea Games

Menurutnya ada tiga opsi yang ditawarkan Komisi X DPR RI. Opsi pertama penyelenggaraan Sea Games di tunda empat bulan. Opsi kedua percepatan penyelesaian kawasan SEA Games Palembang dan

venues cabang olahraga yang belum siap dipindahkan ke Jakarta.

Namun langkah opsi kedua ini dipandang tidak akan optimal. "Memindahkan venues cabang olahraga yang belum siap ke Jakarta akan mencederai

spirit, karena kita menginginkan semua cabang olahraga dilakukan di Palembang," paparnya

"Opsi terakhir SEA Games tetap jalan dengan konsekuensi rekor-rekor yang diinginkan atlet tidak tercapai," tambah politisi dari F-PPDIP.

Menurut hematnya yang paling memungkinkan dan paling sedikit mengalami kerugian adalah SEA Games ditunda. "Tetapi kalau mau memaksakan tetap 11 November kita taulah nanti kita liat saja," ujarnya.

Sementara itu Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng menyatakan, pelaksanaan SEA Games akan tetap digelar pada November tahun ini. SEA Games tidak akan ditunda, Andi mengaku siap bertanggung jawab jika hal itu terjadi.

"Kesimpulannya SEA Games akan siap dilaksanakan 11 November 2011. Semua venue dalam tahap finishing. Baik yang di Jakarta maupun yang di Palembang sudah siap," ujar Andi. (jp/spy/sc) foto:parle



Menpora Andi Alfian Malarangeng



Komisi X DPR RI Rapat membahas persiapan Sea Games

DPR Optimis Pembangunan Venues Sea Games Palembang Selesai Tepat Waktu

Ketua Komisi X DPR RI Mahyudin optimis memproses pembangunan arena pertandingan (*venues*) SEA Games ke-26 di Palembang Sumatera Selatan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

“Hal ini dapat kita lihat dari sejumlah *venues* yang pembangunannya berjalan sesuai rencana,” kata Prof. Mahyudin di depan para wartawan usai meninjau sejumlah lokasi pembangunan *venues* di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang (29/9).

Mengutip keterangan Wahid Iskandar, *Site Manajer* PT Prambanan Dwipaka (perusahaan kontraktor yang mengerjakan pembangunan kolam renang Aquatic), Ketua Komisi X ini mengatakan pembangunan kolam renang Aquatic dapat diselesaikan pada tanggal 15 Oktober 2011. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa saat kunjungan lapangan beberapa waktu yang lalu (red=15-17 Juli 2011 Komisi X berkunjung ke Sumatera Selatan), Pemerintah Daerah (pemda) menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah. Indikasinya adalah pelaksanaan pembangunan sejumlah *venues* yang sudah berjalan sesuai rencana, tambah Mahyudin.

Terkait persoalan lambatnya kurcun dana dari pusat, Komisi X DPR telah mendorong dikeluarkan Kepres untuk percepatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga untuk SEA Games ke-26 Palembang. “Panja Komisi X mengapresiasi pembangunan *venues* yang sedang dilaksanakan Pemprov Sumsel dan INASOC dan optimis dapat selesai tepat waktu,” ujar Mahyudin. Dia mengharapkan sarana penunjang seperti jalan akses menuju ke lokasi *venues* dapat segera diselesaikan.

Saat peninjauan sejumlah anggota Panja Komisi X DPR mempertanyakan penyelesaian pembangunan beberapa *venues* seperti kolam renang Aqua-



Komisi X DPR saat meninjau pembangunan arena pertandingan Sea Games di Palembang

tiq, mengingat pelaksanaan SEA Games yang tinggal menghitung hari. Anggota Komisi X Djamal Azis (FP-Hanura) mempertanyakan kapan kolam renang siap digunakan mengingat proses pembuatannya memerlukan keahlian tersendiri. “Kolam renang inikan tidak bisa sembarangan membuatnya, perlu keahlian tersendiri, yang tentunya memerlukan waktu, oleh karena itu kita perlu kepastian kapan bisa selesai,” ucapnya. Menjawab pertanyaan anggota dewan, *Site Manajer* PT Prambanan Dwipaka, Wahid Iskandar menjelaskan, kolam renang dapat diselesaikan tanggal 15 Oktober 2011, sementara seluruh sarana pendukung dapat diselesaikan tanggal 20 Oktober 2011. “Air kolam tidak akan bocor, air akan masuk ke *balancing tank*, lalu masuk ke *water treatment*, baru kemudian masuk ke dalam kolam dan siap pakai,” ucapnya menjelaskan.

Sementara Gubernur Sumsel Alex

Noerdin saat pertemuan dengan Tim Komisi X tetap menyatakan optimismenya pelaksanaan SEA Games dapat terlaksana sesuai jadwal, namun dirinya menyampaikan keprihatinannya terhadap pemberitaan yang bernada negatif terkait pembangunan sejumlah *venues*. “Pemberitaan media sering memojokkan kami, padahal kita sudah bekerja siang malam untuk menyelesaikan semua *venues*,” keluhnya.

Pada peninjauan kali ini, Tim Panja Komisi X DPR dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Prof. dr. H. Mahyudin (F-PD), dengan anggota : Rinto Subekti dan Juhaini Alie (F-PD), HM. Nasruddin (F-PG), Puti Guntur Soekarno (F-PDI Perjuangan), H. Raihan Iskandar (F-PPS), H. Nasrullah (F-PAN), Tgk. H. Mohd. Faisal Amin (F-PPP), H. Abdul Hamid-Wahid (F-PKB), Jamal Mirdad (FP-Ge-rindra), dan Djamal Azis (FP-Hanura). (Rov.Tvp) foto:parle

DPR Tetapkan 6 Hakim Agung Baru

Rapat Paripurna DPR RI akhirnya secara resmi mengesahkan 6 orang Hakim Agung yang telah dipilih Komisi III dalam proses uji kepatutan dan kelayakan. Mereka terdiri dari dua orang hakim karir dan empat orang hakim non karir.

“Kita sudah melakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III dengan mengutamakan kualitas calon Hakim Agung, yang meliputi integritas, visi dan misi, serta kompetensi,” kata Wakil Ketua Komisi III Fahri Hamzah, saat menyampaikan laporan pada rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/11).

Politisi PKS ini menambahkan 18 kandidat Hakim Agung yang dikirimkan Komisi Yudial telah melewati proses seleksi berupa penulisan makalah dilanjutkan uji kepatutan dan kelayakan. Komisi III memilih enam orang calon berdasarkan perolehan suara terbanyak pertama sampai dengan keenam yang diperoleh masing-masing calon.

Keenam Hakim Agung yang ditetapkan dalam rapat paripurna adalah, Suhadi dengan latar belakang hakim

karir, Gayus Lumbuun – non karir, Nurul Elmiyah – non karir, Andi Samsan Nganro – hakim karir, Dudu Duswara Machmudin – non karir dan Hary Djatmiko – non karir.

Fahri menekankan calon Hakim Agung terpilih diharapkan dapat meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi sekaligus benteng terakhir bagi pencari keadilan.

Suasana rapat paripurna berubah meriah ketika Ketua DPR Marzuki Alie yang bertindak selaku pimpinan sidang memperkenalkan enam Hakim Agung terpilih, terutama ketika nama Gayus Lumbuun dipanggil. “Kita semua sedih ditinggalkan Pak Gayus,” kata Marzuki. Tepuk tangan hadirin dibalas Gayus yang pernah menjabat sebagai

Ketua Badan Kehormatan DPR dengan berdiri dan melambaikan tangan.

Kepada wartawan usai rapat mantan anggota Komisi III ini menjelaskan pilihannya menjadi Hakim Agung karena terpenggil untuk membangun kembali hukum yang sekarang ini diindikasikan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. “Hukum tidak bisa lagi menyelesaikan masalah-masalah, sementara penilaian masalah itu ada dipengadilan, oleh para hakim,” paparnya.

Gayus Lumbuun menjelaskan akan menyesuaikan diri dengan tugas barunya sebagai hakim. “Sebagai politisi saya dituntut banyak bicara tapi sebagai Hakim Agung saya harus mematuhi kode etik tidak boleh banyak bicara,” lanjutnya. Namun ia menambahkan tidak akan membiarkan lembaga hukum MA menjadi beku. “Yang tidak boleh bicara berkenaan kasus atau perkara tapi untuk memberikan informasi tentang hukum yang harus ditaati, hukum yang harus dibangun, itu tugas hakim juga untuk bicara.” (iky)/foto:iw/parle.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fahri Hamzah saat menyampaikan laporan pada rapat Paripurna di Gedung DPR RI

Baleg Minta Masukan Akademisi Terkait RUU Daerah Kepulauan

Rapat Dengar Pendapat Umum yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Ida Fauziah, siang itu, Rabu (5/9) mengundang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Niette V. Huliselan Guru Besar Universitas Patimura dan Ganewati Wuryandari.

Ida mengatakan, latar belakang pembentukan UU ini adalah tingkat kesejahteraan di daerah kepulauan yang sangat rendah disebabkan keterbatasan masyarakat dalam menjangkau hasil-hasil dari pembangunan.

Selain itu, keterbatasan dana yang dialokasikan pemerintah pusat (DAU/DAK) karena perhitungan dalam mendapatkan porsi dana didasari oleh luasnya wilayah daratan bukan lautan sebagai satu kesatuan wilayah.

Ida menambahkan, dalam Prolegnas RUU Prioritas 2011 nama RUU ini tertulis RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan. Untuk menghasilkan RUU yang komprehensif, Baleg mengundang berbagai kalangan yang terkait dengan RUU ini untuk dapat memberikan masukan-masukan.

Dalam memberikan masukannya Rokhmin Dahuri mengingatkan perlunya sinkronisasi dengan UU yang ada terkait dengan Daerah Kepulauan. UU itu diantaranya adalah, UU No. 17/1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB (Unclos) 1982, tidak dikenal provinsi (daerah) kepulauan dalam suatu negara.

Selain itu, katanya, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rokhmin mengusulkan, RUU tentang Daerah Kepulauan ini sebaiknya tidak dibuat dalam bentuk UU. Jika DPR tetap akan meneruskan pemba-

han RUU ini ada dua skenario yang diajukannya. Skenario pertama, menyempurnakan materi yang ada dalam Draft RUU Daerah Kepulauan. Skenario kedua, nama RUU tersebut diganti menjadi RUU Kawasan Ekonomi Khusus Daerah Kepulauan atau RUU Percepatan Pembangunan Pulau-pulau Kecil.



Wakil Ketua Baleg Ida Fauziah

ngaturan secara khusus tentang daerah Kepulauan perlu dilakukan segera.

Menurut Niette, penyamaan karakteristik daerah berbasis daratan dan kepulauan dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan antar daerah. Dia juga melihat, kewenangan daerah di wilayah laut belum diatur secara substansial untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dia juga mengingatkan, jangan sampai terjadi tumpang tindih RUU ini dengan UU yang sudah ada sebelumnya. Ganewati Wuryandari dalam memberikan masukannya menegaskan, Daerah Kepulauan tidak perlu diatur dalam Undang-undang. Menurut pendapatnya, di sini yang diperlukan adalah PP untuk mengoperasionalkan dari Pasal-pasal tersebut.

Pandangan ini berdasarkan pemikiran apakah kehendak untuk "perlakuan khusus daerah kepulauan" harus perlu diberi kerangka hukum

Realitas daerah kepulauan tersebut membutuhkan solusi-solusi dalam pengaturannya. Oleh sebab itu, pe-

dalam bentuk UU. Karena UU 32/2004 pasal 18 jelas telah memberikan kewenangan pengelolaan wilayah laut. Harmonisasi dan keserasian peraturan perundangan perlu dilakukan agar tidak ada tumpang tindih.

Selain itu, apakah nantinya keberadaan UU Daerah kepulauan ini tidak akan menyebabkan adanya paradigma bahwa Indonesia terdiri atas provinsi/kabupaten/kota kepulauan dan propinsi/kabupaten/kota daratan. Padahal, katanya, sejarah panjang memperlihatkan kerja keras diplomasi kita untuk mendapatkan pengakuan masyarakat internasional akan eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan.

Dalam membahas RUU ini, Ganewati mengingatkan Baleg perlunya kehati-hatian dan perlunya studi yang lebih mendalam. Baginya, RUU ini terlalu dini diajukan karena perlu pemikiran lebih mendalam dan membutuhkan waktu yang panjang jika ingin mencari solusi bagi daerah kepulauan. (tt) foto:ry/parle



kalangan akademisi yang diminta untuk memberikan masukan terkait RUU Daerah Kepulauan

DPR Tetapkan Pimpinan Pansus RUU Pemilu

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Senin, (3/10), di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (kedua dari kanan) memimpin rapat penetapan pimpinan Pansus RUU Pemilu

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat penetapan pimpinan Pansus RUU Pemilu menyampaikan unsur Pansus terdiri dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP).

Setelah melalui proses lobi-lobi yang cukup alot, akhirnya Arief Wibowo dari F-PDIP ditetapkan sebagai Ketua Pansus.

Rapat tersebut juga menetapkan tiga wakil Ketua Pansus, di antaranya Saan Mustopa (Fraksi Partai Demokrat), Taufiq Hidayat (F-PG), dan Arwani Thomafi (Fraksi PPP). (as) foto:as

Dalam Kunjungannya kali ini Komisi VII yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologidan Lingkungan Hidup akanmengawal komitmen pemerintah memulihkan Danau Rawa Pening diKabupaten Semarang, yang termasuk dalam Rencana Aksi Nasional Terpadu 15 Danau Prioritas 2010-2015.

“Kami memang akan berkonsentrasi penuh untuk dapat menyelesaikan permasalahan Danau Rawa Pening, karena Danau Rawa Pening ini mendesak untuk direhabilitasi, karena kerusakannya sudah tergolong parah, seperti pertumbuhan eceng gondok yang sulit untuk diberantas, selain itu juga terjadi sedimentasi yang cukup tinggi, sehingga saat ini, danau tersebut sulit dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat sekitar,” jelas Ali Kastella, Ketua Rombongan saat pertemuan dengan Bupati Kabupaten Semarang, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Jum’at(30/9).

Danau Rawa Pening selama ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai PLTA, perikanan, sumber air baku air minum, dan irigasi pertanian, tumbuhan eceng gondok yang tumbuh di sekitaran danau juga dapat dimanfaatkan untuk kerajinan tangan,tetapi sekarang tumbuhan eceng gondok yang tadinya menjadi sumber penghasilan, sekarang ini menjadi musuh terbesar.

“Pertumbuhan eceng gondok yang kian hari kian bertambah membuat Danau Rawa Pening tidak lagi dapat dimanfaatkan masyarakat seperti dahulu, tumbuhan eceng godok sekarang ini berbalik menjadi musuh besar masyarakat”, terang MundjirinBupati Kabupaten Semarang yang ikut menghadiri pertemuan dengan Komisi VII.

Kecepatan pertumbuhan eceng gondok di Rawa Pening mencapai 3,69% berat ecenggondok basah per hari (Penelitian Widyanto, IPB 1998), dan dalam waktu 30 hari,pertumbuhan eceng gondok sudah mencapai 110% lebih banyak daripada hari pertama.

Ali Kastella menambahkan, tidak hanya berhenti di situ saja, permasalahan lain dari Rawa Pening yaitu daerah yang semula berupa mangkuk kini berubah menjadi piring akibat sedimentasi yang mengakibatkan banjir

Rawa Pening Mendesak Untuk Direhabilitasi

Panja Danau Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Danau Rawa Pening yang terletak diKabupaten Semarang, Jawa Tengah.



Komisi VII DPR saat meninjau Danau Rawa Pening di Kabupaten Semarang

lahan sawah hingga ke 4 kecamatan.

Deputi III Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Arief Yuwono mengatakan, eceng gondok sebaiknya dijadikan sabuk hijau di pinggiran danau, dengan bagian tengah danau bersih dari ecceng gondok. Dengan begitu, diharapkan, masalah sedimentasi dapat teratasi.

“Pengurangan eceng gondok juga dapat dilakukan dengan alternatif lain, yaitu memberikan *bio control*, seperti memberi ikan grass capr yang memakan eceng gondok.dan kami berupaya konservasi Rawa Pening diharapkan menjadi model percepatan penyelesaian penyelamatan danau bagi danau-danau lain di Indonesia,”harap Arief.

Menurut Dewi Aryani Hilman, permasalahan Rawa Pening dapat diselesaikan dengan3 kata kunci, yaitu *open mind*, *open heart*, dan yang terakhir adalah*open will*. Anggota yang sedang meneruskan kuliahnya di *The Sloan School of Management at the Massachusetts Institute of Technology (MIT)* menuturkan, “ dengan open

mind kita dapat menyatakan persamaan persepsi untuk sama-sama ingin membangun dan membenahi Danau Rawa Pening. Lalu *open heart*, dengan *open heart* kita harus sama-sama sadar bahwa untuk membenahi Danau Rawa Pening ini merupakan sebuah kewajiban dan kebutuhan, karena manusia tentu tidak akan terlepas dengan lingkungan, yang terakhir adalah *open will*, dengan *open will* kita harus sudah mulai mencari dan menambah ilmu agar dapat memetakan dengan cara bagaimana kita membenahi Danau Rawa Pening, kita harus sudah mulai menyiapkan strategi-strategi untuk pembenahannya,” tegasnya.

Rombongan Tim Panja Danau Komisi VII DPR RI yang mengunjungi Danau Rawa Pening di Ketuai oleh Ali Kastella (F-PHanura), dan anggota lainnya yang turut dalam rombongan Sugihono Karyosuwondo (F-PKS), Teuku Irwan (F-PD), Rachmat Hidayat (F-PDIP), Dewi Aryani Hilman (F-PDIP), Irna Narulita (F-PPP), Markum Singodimejo (F-PG), Muhammad Syafrudin (F-PAN). // (ra) foto:parle

DPR Tetapkan Pimpinan Pansus RUU Ormas

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas), Senin, (3/10), di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat penetapan pimpinan Pansus RUU Pemilu menyampaikan setelah melalui proses lobi-lobi, akhirnya Abdul Malik Haramain dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ditetapkan sebagai Ketua Pansus Ormas.

Rapat tersebut juga menetapkan tiga wakil Ketua Pansus Ormas, diantaranya Deding Ishak dari Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG), Rahardi Zakaria Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), dan Michael Watu-mena Fraksi Partai Demokrat (F-PD). (as)foto:as



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (kiri) memimpin rapat penetapan pimpinan Pansus RUU Pemilu

Komisi I DPR Desak Kemenhan Prioritaskan Industri Dalam Negeri

Komisi I DPR mendesak Kemenhan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan Alutsista dengan mengedepankan pertumbuhan industri dalam negeri.



Enggartiaso Lukito dari F-PG

Hal tersebut mengemuka saat Komisi I DPR mengadakan Raker dengan Kementerian dan Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq, di Gedung Nusantara I, Senin, (3/10).

Menurut Enggartiaso Lukito (F-PG), guna memenuhi Minimum Essential Force (MEF) harus mengedepankan

faktor kemampuan mencegah kekuatan musuh, itu yang utama dalam peremajaan Alutsista.

Kemudian, lanjut Enggar, Pemerintah harus memprioritaskan belanja Dalam Negeri. sementara untuk Pembelian Luar Negeri (PLN) dengan cara memanfaatkan bank Indonesia yang berada di Indonesia dalam bentuk sinkdikasi.

Menyinggung anggaran pemeliharaan dan perawatan, Enggar menilai anggaran itu cenderung tidak efisien bahkan mencapai 30 persen dari total anggaran. "bisa jadi ini penyebab Alutsista yang kurang layak karena itu seharusnya diinvestasikan pada pembelian Alutsista baru,"katanya.

Dia mendesak pemerintah mendorong industri dalam negeri dengan memprioritaskan lokal content. "Lokal kontent harus diperhatikan dalam pembelian Alutsista dan kitamengharapkan dapat tercapai dalam RAPBN 2012,"jelasnya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pengadaan Alutsista didalam negeri dapat dilakukan dengan joint production, bila tidak bisa juga menggunakan offset, bahkan bila melakukan impor Alutsista dilakukan dengan trade off. "Untuk percepatan dalam Minimum Essential Force (MEF) sebesar Rp. 50 Triliun, dan terpakai 4 Triliun. sementara total belanja modal dan Pemeliharaan dan perawatan estimasi Rp. 150 triliun sementara terpakai pada akhir desember diperkirakan Rp. 15.6 Triliun,"katanya. (si)foto:iw/parle.

Tommy Adrian Firman Dilantik Menjadi Anggota DPR RI

Tommy Adrian Firman dari Partai Persatuan Pembangunan dilantik menjadi Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie. Pelantikan berlangsung di Operation Room Gedung DPR RI Jakarta, Senin (3/10)



Tommy Adrian Firman dari Partai Persatuan Pembangunan dilantik menjadi Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie

Tommy menggantikan rekan satu fraksinya Izzul Islam. Izzul Islam dicopot dari keanggotaannya sebagai Anggota DPR RI karena tersangkut ijazah palsu saat mendaftar sebagai Caleg PPP.

Tommy yang dilantik berdasarkan KEPPRES Nomor 53/P Tahun 2011 mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) bertekad ingin memajukan pariwisata NTB menjadi seperti Pulau Dewata.

“Saya akan memperjuangkan dae-

rah asal saya yaitu NTB dalam bidang pariwisata dan saya belum tahu akan ditempatkan di komisi berapa masih menunggu petunjuk dari pimpinan fraksi,” ujar Tommy.

Tommy yang merupakan Wakil Ketua Departemen Olahraga DPP PPP, mengaku sebagai mantan atlet karateka nasional dan pernah mendapat tujuh medali emas Sea Games, serta pernah menduduki peringkat keempat World Karate Federation (WKF) ingin mengembalikan kembali fasilitas

olahraga yang saat ini sudah banyak berubah menjadi tempat hiburan seperti mall.

Sebagai Anggota DPR RI yang baru saja dilantik dirinya tidak takut dengan citra buruk DPR, menurutnya dalam waktu tiga tahun masa jabatannya sebagai anggota DPR dia benar-benar akan mengabdikan bagi rakyat terutama masyarakat NTB yang telah memilihnya sesuai dengan sumpah dan janji yang baru saja dia lakukan. (sc/jp) foto:parle

Lembaga Pengelola Pangan Tidak Harus Definitif

Anggota komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin menilai lembaga Pengelola Pangan yang nantinya memegang amanat dalam pengelolaan pangan tidak perlu definitifdi sebut nama lembaganya meskipun lembaga tersebut adalah lembaga milikpemerintah.



Sebelumnya Ma'mur Hasanuddin yang juga anggota panja dan tim perumus RUU pangan mengusulkan lembaga yang diamanatkan sebagai pengelola pangan ini sebaiknya diserahkan lembaga setingkat menteri. Karena selama ini yang terjadi, hampir semua kebijakan pengelolaan pangan bersinggungan dengan berbagai lembaga, seperti menteri perdagangan, menteri pertanian, Bulog, menteri

kesehatan, menteri sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahkan menko perekonomian dan menko kesejahteraan rakyat turut berpartisipasi dalam pengelolaan pangan ini.

"Lembaga pengelola pangan yang tercantum dalam RUU pangan ini sebaiknya cukup disebut lembaga setingkat menteri, tidak perlu nama lembaganya disebut secara devinitif", kata Ma'mur.

Jika nama lembaga disebut dalam pengelola pangan dalam RUU, Ma'mur sangat khawatir bahwa lembaga tersebut akan bertindak semaunya karena merasa dilindungi oleh payung undang-undang. Jika memang lembaga tersebut berpihak kepada rakyat, tentu semua pihak tidak akan keberatan. Namun tidak ada yang dapat menjamin ke depan seperti apa sepak terjang lembaga yang telah devinitif disebut dalam RUU dalam mengemban amanat pengelolaan pangan.

Tujuan utama merevisi undang-undang pangan ini adalah menjawab tantangan global dalam memenuhi hak rakyat akan pangan. "Jangan sampai RUU pangan yang terbentuk nantinya, malah akan semakin memperburuk kualitas undang-undang yang selama ini sedang berjalan", tambah ketua DPP PKS wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (BANJABAR) ini.

Ma'mur menerangkan, bahwa usulan lembaga setingkat menteri dalam mengelo lapangan ini tidak diusulkan satu atau dua orang saja di Komisi IV DPR. Hampir semua keterwakilan fraksi yang turut dalam membahas RUU pangan sebelumnya, menginginkan pengelolaan pangan ini dipusatkan pada lembaga setingkat menteri khusus menangani pangan.

"Usulan-usulan yang diungkapkan oleh beberapa anggota komisi IV tentang lembaga pengelola pangan ini tentunya bukan sekedar usulan pribadi. Sebelumnya tiap anggota panja RUU pangan ini tentu telah mendapat masukandari berbagai kalangan untuk memperbaiki RUU yang saat ini sedang berjalan. Untuk itu, RUU Pangan tidak perlu devinitif menyebut lembaga. Apalagi lembaga tersebut hanya setingkat badan," jelas Ma'mur. (si)foto:si

DPR RI terima IHPS dan LHP Semester I- 2011 BPK

“BPK juga menemukan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebanyak 7967 kasus atau setara 18,96 triliun rupiah,” kata Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Purnomo Hadi di depan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 4/10/11, sesaat sebelum menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I tahun anggaran 2011.

Lebih lanjut Purnomo mengemukakan dari hasil pemeriksaan yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2011 menemukan sebanyak 11430 kasus senilai 26,68 triliun rupiah. Total objek pemeriksaan BPK pada semester I tahun 2011 sebanyak 682 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan sebanyak 460 objek, kinerja sebanyak 140 objek, PDDT 208 objek. Adapun objek pemeriksaan keuangan meliputi LKPP, LKKL, LKPD dan LK badan lainnya termasuk LK BHMN, tambahnya.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie tersebut Purnomo mengatakan bahwa BPK mem-

BPK Temukan 3.463 Kasus Ketidak patuhan Penggunaan Keuangan Negara Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan 3463 kasus atau setara 7,71 triliun rupiah ketidakpatuhan penggunaan Keuangan Negara yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian serta kekurangan penerimaan Negara.

nomo mengatakan bahwa BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 52 LKKL, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 29 LKKL dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 2 LKKL tahun 2010 kementerian, lembaga Negara dan lembaga negara non kementerian.

Pelayanan transportasi Haji masih bermasalah

Sementara itu dalam penyelenggaraan haji tahun 1431H/2011 M, Purnomo mengemukakan bahwa BPK menemukan bahwa dalam pelaksanaan masih ditemukan permasalahan pelayanan transportasi terhadap perumahan yang lokasinya jauh dari titik penjemputan belum optimal yang sering

menimbulkan kelelahan fisik, khususnya bagi jemaah usia lanjut/sakit.

Hasil pemantau penyelesaian kerugian negara/dareah semester I tahun 2011 menunjukkan bahwa kerugian Negara/daerah periode tahun 2004 sampai Semester I tahun 2011 adalah sebanyak 85.139 kasus senilai Rp 17,93 triliun dan yang terangusur sebanyak 18.297 kasus senilai Rp 1,81 triliun. Pelunasan Rp. 4,84 triliun dan penghapusan kerugian mencapai Rp. 10,20 triliun.

Dalam laporan tersebut juga terungkap bahwa laporan yang berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada penegak hukum dari tahun 2003 sd. Semester I 2011 adalah 305 kasus 33, 66 triliun rupiah dengan sisa kasus yang belum ditindak lanjuti sebanyak 139. (LSS)/foto:iw/parle.



Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Purnomo Hadi menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I tahun anggaran 2011 kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie

RUU Bantuan Hukum Disahkan Di Paripurna

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie, Selasa(4/10), telah mensahkan RUU tentang Bantuan Hukum menjadi Undang-Undang. Sebelumnya, RUU ini telah dibawa pada Pembicaraan Tingkat I Badan Legislasi(Baleg) DPR RI pada tanggal 20 September lalu.



Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub memberikan draf RUU Bantuan Hukum kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie

Dalam laporannya, Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub mengatakan, dalam membahas RUU ini, Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas RUU tersebut bersama DPR.

Rapat Konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 13 Juli 2010 telah menugaskan Badan Legislasi untuk membahas RUU ini bersama dengan Pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I.

Sunardi mengatakan, dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan Pemerintah terdiri dari 183, 31 DIM bersifat tetap, 28 DIM bersifat redaksional dan 124 DIM bersifat substansial. Dalam hal ini, Baleg telah menyelesaikan seluruh pembahasan DIM tersebut dan memutuskan

untuk menugaskan pembahasan terhadap 124 DIM yang bersifat substansial kepada Panitia Kerja (Panja).

Selain rapat Panja, dalam rangka mendapatkan kesepakatan atas substansi yang krusial khususnya yang terkait dengan kelembagaan bantuan hukum (Komisi Nasional Bantuan Hukum), Baleg mengadakan beberapa kali lobby yang dihadiri Pimpinan Baleg, Pimpinan Poksi Baleg dengan Pemerintah.

Beberapa substansi/materi RUU tentang Bantuan Hukum yang telah disepakati dalam Rapat Kerja antara Baleg dengan Pemerintah tanggal 20 September 2011, antara lain adalah, tujuan penyelenggaraan bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum, wewenang Menteri, verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan serta pendanaan ban-

tuhan hukum.

Penerima bantuan hukum dalam UU ini adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum di bidang keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UU ini.

Sedang penyelenggara bantuan hukum dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Untuk verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai layanan bantuan hukum dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Verifikasi ini dilakukan oleh sebuah panitia yang dibentuk menteri yang unsurnya terdiri dari kementerian, akademisi, tokoh masyarakat dan lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum.

Sementara untuk pendanaan bantuan hukum, sesuai dengan undang-undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain APBN, sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Sunardi berharap, dengan disahkannya RUU ini diharapkan dapat semakin mendorong dan memperkuat terwujudnya hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum khususnya bagi orang miskin dalam mendapatkan akses keadilan. (tt)/foto:iw/parle

Ketua DPR Terima Naskah Draft Usulan RUU Kepulauan

Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang didampingi oleh Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, Ketua Komisi II, Chairuman Harahap dan Anggota Komisi II, Alexander Litaay (F-PDIP), menerima kunjungan Kepala Daerah 7 Provinsi Kepulauan, di Ruang Rapat Pimpinan, Kamis (6/10).

Kunjungan Kepala Daerah 7 Provinsi Kepulauan yang diketuai langsung oleh Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, menurukan kunjungannya kali ini adalah untuk memberikan usulan draft Naskah RUU tentang Perlakuan Khusus Bagi Daerah Kepulauan.

“Tujuan kami ke DPR RI adalah untuk menyerahkan draft naskah RUU tentang Perlakuan Khusus Bagi Daerah Kepulauan. Kami menginginkan agar RUU ini dapat segera disahkan agar kami selaku pemerintah daerah dapat menunjukkan eksistensi kami sebagai daerah kepulauan dan tentunya dapat lebih leluasa mengelola Sumber Daya yang ada di daerah kami,” terang Karel.

Karel menyatakan, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, dan setengah dari total penduduk Indonesia menetap di provinsi kepulauan, namun kondisi ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat di daerah daratan.

“Sejak tahun 2005 kami memperjuangkan RUU ini. Dan untuk mewadahnya kami membentuk Forum Komunikasi antar Provinsi dan kepulauan, namun akhir-akhir ini forum tersebut, kami ubah menjadi Badan Kerjasama antar Kepulauan, karena diharapkan dari forum ini kami lebih dapat bekerjasama antar provinsi kepulauan lainnya. Kemiskinan di kepulauan lebih miskin dibandingkan daerah daratan. Diantara pulau-pulau itu ada ruang publik. seperti di daratan ada jalan, di pulau ada lautan. Ini yang selama ini tidak menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam pembagian anggaran” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua badan Legislasi Ignatius Mulyono atau yang biasa disapa Pak Mul mengatakan, terkait dengan ranca-



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Kunjungan Kepala Daerah 7 Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI

ngan RUU Kepulauan, saat ini sudah berjalan hingga penyusunan naskah akademik, dan draft dasarnya sedang diproses oleh tenaga ahli yang berkompeten,

“Nantinya kami merencanakan RUU Kepulauan ini terdiri dari 9 bab dan 35 pasal, tetapi tentunya dalam perjalanan prosesnya nanti akan ada perubahan tergantung dari kondisi penyusunan RUU tersebut,” jelas Pak Mul.

RUU Kepulauan ini dibahas secara simultan bersama dua RUU lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam pembahasannya, 2 RUU lainnya yang dimaksud adalah RUU Daerah Tertinggal dan RUU Perbatasan Wilayah Negara.

Marzuki Alie dalam akhir pertemuan menyatakan, dalam penyusunan RUU Kepulauan ini memang sebaiknya pemerintah daerah ikut mengawal penyusunan draft nas-

kah RUU ini, agar jika dalam prosesnya ada masalah dapat langsung dikomunikasikan. “Hal-hal yang sifatnya substansial memang sudah seharusnya dikawal oleh Gubernur, agar jika ada masalah berbagai hal yang sifatnya substansial dapat segera diselesaikan dan segala aspirasi yang disampaikan, dapat terserap,” pungkasnya. (ra) foto:as/parle





Sekretariat Jenderal DPR menerima penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan 2010 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, diterima Sekjen DPR Nining Indra Saleh pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, di Aula Dhanapala Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Senin (19/9). foto:RY



Piagam Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia yang di terima oleh DPR RI atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan 2010 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jakarta, Senin (19/9). foto:RY



Piagam Penghargaan Peringkat Ke tiga Terbaik Pelayanan Informasi yang di terima oleh DPR RI dari Komisi Informasi Pusat. Jakarta, Kamis, (29/9)